

**INTEGRASI NILAI DAN ETIKA ISLAM DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN**

Imam Moltattakim¹, Moh. Faiq Sihab, Egytajhon

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹moltattakimi@gmail.com, ²faiqsihab2006@gmail.com,
egytajhon@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan dalam tata kelola pemerintahan seperti rendahnya integritas, kurangnya transparansi, dan belum optimalnya penerapan nilai etika dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada instansi pemerintahan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan musyawarah telah dipahami oleh aparatur, namun implementasinya masih belum optimal dan cenderung bersifat parsial. Kendala utama yang ditemukan meliputi faktor struktural berupa belum terintegrasinya nilai etika dalam kebijakan, serta faktor kultural berupa rendahnya internalisasi nilai dalam budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan memerlukan pendekatan yang sistematis melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas.

Kata Kunci: tata kelola pemerintahan; etika Islam; integritas; good governance; pelayanan publik

ABSTRACT

This study is motivated by ongoing issues in governance, including low integrity, limited transparency, and the suboptimal implementation of ethical values in public administration. This study aims to analyze the integration of Islamic values and ethics in governance and to identify factors influencing their implementation. This research employs a qualitative approach with a case study design conducted in a local government institution. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic values such as trustworthiness, honesty, justice, and deliberation are understood by public officials; however, their implementation remains partial and not fully optimized. The main challenges include structural factors, such as the lack of integration of ethical values into policies, and cultural factors, such as weak internalization of values within organizational culture. This study concludes that integrating Islamic values and ethics into governance requires a systematic approach through strengthening regulations, enhancing human resource capacity, and developing an organizational culture oriented toward integrity and professionalism.

Keywords: governance; Islamic ethics; integrity; good governance; public service

Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 417 – 424.

Indonesia, berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya integritas aparatur negara masih menjadi tantangan serius yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang berkualitas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendekatan struktural dan administratif saja belum mampu menjawab persoalan tata kelola secara menyeluruh, sehingga diperlukan penguatan nilai dan etika sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Etika pemerintahan memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik (Indriasari, 2024).

Dalam perspektif Islam, tata kelola pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai sistem administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip moral dan spiritual. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan (al-‘adālah), serta musyawarah menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang beretika. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa etika pemerintahan dalam Islam memiliki tiga pilar utama, yaitu kejujuran sebagai manifestasi amanah, integritas dalam tindakan, serta musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik (Ramadhan, Hadist, & Kurniati, 2024). Selain itu, nilai keadilan (al-‘adālah) dalam Islam juga dinilai relevan dalam menjawab tantangan pemerintahan modern, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial (Tabansa et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai dalam tata kelola pemerintahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai ideal dan praktik di lapangan. Hal ini tercermin dalam masih rendahnya kualitas pelayanan publik, lemahnya etika birokrasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Saputri et al., 2024). Di sisi lain, tantangan etika dalam kepemimpinan pemerintahan daerah, seperti praktik korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan, juga menunjukkan bahwa aspek moral belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rodzi, 2024). Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengintegrasikan nilai dan etika, khususnya nilai-nilai Islam, ke dalam sistem tata kelola pemerintahan sebagai upaya memperbaiki kualitas pemerintahan secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun nilai dan etika Islam telah banyak dikaji secara konseptual, implementasinya dalam tata kelola pemerintahan modern masih belum optimal dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan publik maupun praktik birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara mendalam bagaimana proses integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan model tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan serta mengidentifikasi strategi implementasi yang efektif dalam

konteks pemerintahan modern. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan etika publik, serta kontribusi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan keadilan. Dalam penelitian ini, integrasi nilai dan etika Islam didefinisikan sebagai proses penginternalisasian prinsip-prinsip ajaran Islam ke dalam sistem, kebijakan, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan secara sistematis dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji secara mendalam integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara holistik, kontekstual, dan berbasis makna dari perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemerintahan (Creswell, 2014). Desain penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu menelaah secara intensif praktik tata kelola pemerintahan pada satu lokasi tertentu guna memperoleh gambaran empiris yang komprehensif dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan pada salah satu instansi pemerintahan daerah yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Tahapan penelitian diawali dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan, dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, serta penarikan kesimpulan.

Subjek penelitian terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pejabat struktural, serta pihak terkait yang memiliki keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman kerja, posisi jabatan, serta pemahaman terhadap nilai dan etika dalam pemerintahan (Sugiyono, 2019). Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai titik kejenuhan (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi lebih luas sesuai dengan respons informan. Observasi dilakukan secara non-partisipatif untuk mengamati perilaku aparatur, pola interaksi, serta praktik tata kelola pemerintahan dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kinerja, peraturan, serta arsip lain yang relevan dengan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator integrasi nilai dan etika Islam, seperti amanah (tanggung jawab), shiddiq (kejujuran), tabligh (transparansi), dan fathanah (kompetensi). Lembar observasi digunakan untuk mencatat fenomena empiris yang terjadi di lapangan, sedangkan format dokumentasi digunakan untuk mengorganisasi data tertulis yang diperoleh. Peneliti juga berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara langsung.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, dengan mengacu pada model Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola, hubungan, serta makna dari data yang telah dianalisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga teknik member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan data. Dengan prosedur tersebut, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun proposal penelitian, menentukan lokasi dan informan, serta menyiapkan instrumen penelitian. Pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, pada tahap analisis, data yang diperoleh dianalisis secara berkelanjutan hingga diperoleh kesimpulan yang valid. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang serupa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan telah diupayakan melalui berbagai mekanisme formal seperti

penerapan standar operasional prosedur (SOP), kode etik aparatur, serta penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis dalam keseluruhan proses birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa pemahaman aparatur terhadap nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran (shiddiq), keadilan (al-‘adālah), dan musyawarah sudah cukup baik pada tataran konseptual, tetapi belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif dan implementasi empiris dalam tata kelola pemerintahan.

Pada aspek amanah, sebagian besar informan menyatakan bahwa tanggung jawab kerja telah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya upaya penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan kesadaran terhadap kewajiban pelayanan publik. Namun, hasil observasi menunjukkan masih adanya praktik keterlambatan layanan dan kurangnya disiplin kerja pada beberapa unit tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Indriasari (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya internalisasi nilai etika dalam organisasi publik dapat memengaruhi kualitas kinerja aparatur. Dalam perspektif teori etika Islam, amanah bukan hanya sebatas menjalankan tugas, tetapi juga mencakup komitmen moral untuk memberikan pelayanan terbaik secara konsisten. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai amanah masih berada pada tahap normatif dan belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi.

Selanjutnya, pada aspek kejujuran (shiddiq), penelitian menemukan adanya upaya peningkatan transparansi melalui penggunaan sistem informasi pelayanan publik. Aparatur cenderung memberikan informasi yang jelas terkait prosedur dan persyaratan layanan. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya keterbatasan akses informasi, terutama pada layanan tertentu yang belum terdigitalisasi secara optimal. Selain itu, beberapa informan mengungkapkan bahwa transparansi belum sepenuhnya diterapkan dalam proses internal, seperti pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran belum sepenuhnya terinternalisasi dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ramadhan et al. (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pemerintahan berbasis nilai Islam masih menghadapi tantangan struktural dan kultural.

Pada aspek keadilan (al-‘adālah), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur telah berupaya memberikan pelayanan yang setara kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perlakuan yang tidak sepenuhnya adil, seperti prioritas pelayanan yang dipengaruhi oleh kedekatan personal atau kepentingan tertentu. Temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip keadilan. Jika dikaitkan dengan teori good governance, keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Penelitian Tabansa et al. (2024) juga menegaskan bahwa nilai keadilan dalam perspektif Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan penegakan aturan menjadi faktor penting dalam memastikan implementasi nilai keadilan secara konsisten.

Pada aspek musyawarah, penelitian menemukan bahwa proses pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan umumnya dilakukan melalui forum rapat dan diskusi internal. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah telah diakomodasi dalam mekanisme birokrasi formal. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses tersebut masih terbatas dan cenderung bersifat simbolik. Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme partisipasi yang efektif serta minimnya keterbukaan informasi kepada publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputri et al. (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan good governance. Dalam perspektif Islam, musyawarah tidak hanya melibatkan internal organisasi, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang inklusif.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, belum terdapat kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem tata kelola pemerintahan, sehingga implementasinya masih bergantung pada inisiatif individu aparatur. Secara kultural, masih terdapat pola pikir dan kebiasaan kerja yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika Islam, seperti kurangnya disiplin, rendahnya transparansi, dan terbatasnya partisipasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai dan etika tidak cukup dilakukan melalui regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan budaya organisasi secara menyeluruh.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memperkuat konsep bahwa integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara sistematis melalui kebijakan, sistem, dan budaya organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmu pemerintahan dan etika publik dengan menekankan pentingnya pendekatan nilai dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi berbasis etika, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan nilai dan etika Islam, serta penguatan sistem pengawasan untuk memastikan implementasi nilai secara konsisten.

Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kebaruan dalam bentuk model integrasi nilai dan etika Islam yang menekankan tiga aspek utama, yaitu integrasi pada level individu (internalisasi nilai), level organisasi (budaya kerja dan sistem), serta level kebijakan (regulasi dan pengawasan). Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan rendahnya integritas dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, integrasi

nilai dan etika Islam tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Nilai-nilai utama seperti amanah, kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*al-‘adālah*), dan musyawarah telah dipahami oleh aparatur sebagai prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih belum optimal dan cenderung bersifat parsial, sehingga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya organisasi dan praktik birokrasi sehari-hari.

Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai dan etika Islam dengan realitas implementasinya di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala seperti kurangnya disiplin kerja, keterbatasan transparansi informasi, inkonsistensi dalam penerapan prinsip keadilan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai dan etika Islam tidak cukup hanya dilakukan pada tataran konseptual, tetapi memerlukan dukungan sistem, regulasi, serta komitmen yang kuat dari seluruh elemen organisasi pemerintahan.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai dan etika Islam dapat menjadi pendekatan alternatif dalam memperkuat konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek moral dan etika publik. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa upaya integrasi nilai dan etika Islam perlu dilakukan secara sistematis melalui penguatan kebijakan berbasis etika, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalitas.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan integrasi nilai dan etika Islam dalam tata kelola pemerintahan sangat ditentukan oleh sinergi antara internalisasi nilai pada individu aparatur, penguatan sistem organisasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, aparatur, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika Islam secara konsisten dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Program Studi Administrasi Publik, atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan akademik dan

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 417 – 424.

lingkungan belajar yang kondusif sangat membantu penulis dalam mengembangkan pemahaman serta menyelesaikan penelitian dengan baik.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Agama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta wawasan yang sangat berharga terkait nilai dan etika Islam. Ilmu dan motivasi yang diberikan menjadi landasan penting dalam penyusunan penelitian ini, khususnya dalam mengintegrasikan perspektif keislaman dalam kajian tata kelola pemerintahan.

\Semoga segala bantuan, dukungan, dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal serta menjadi amal kebaikan.

Daftar Pustaka

- Indriasari, R. (2024). Sinergi kepemimpinan kolaboratif: Etika sebagai pilar dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 173–179.
- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati. (2024). Etika pengelolaan pemerintahan perspektif hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22.
- Saputri, D. Z., Apriyanti, F., Aldana, A. E., Aulia, K. R. B. S., Maharani, Z. P., & Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai dalam tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5).
- Tabansa, C. V., Aprilya, D. N., Nyoman, T. N., Adisty, F. A., Debatara, A. T. E., & Baidhowi. (2024). Penerapan nilai al-‘adālah dalam good governance Islam dalam menjawab tantangan keadilan pemerintah modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6).